

BAB I SEJARAH PROFESI KEGURUAN DI INDONESIA

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis proses dan sejarah kemunculan profesi guru

Deskripsi Singkat

Pada topik Sejarah Profesi Keguruan di Indonesia akan dibahas mengenai runtutan riwayat profesi Keguruan dari awal zaman Pra-Hindu Budha; zaman Hindu-Budha; zaman kesultanan Islam; Zaman Belanda di Indonesia; Zaman Pendudukan Jepang; dan pada akhirnya Guru di zaman setelah kemerdekaan sampai sekarang.

Peta Konsep



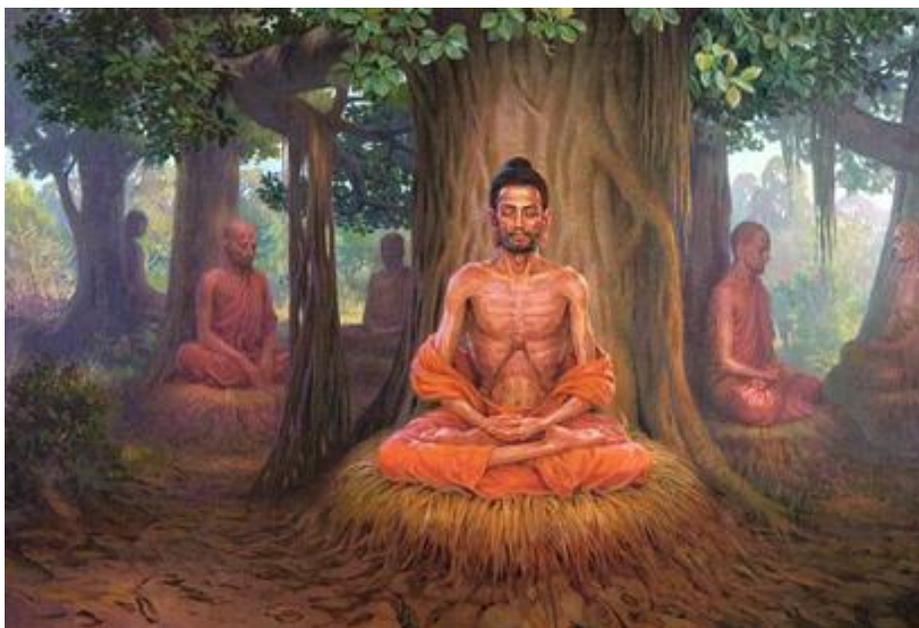
A. Awal Kemunculan Guru di Indonesia

a. Guru di Zaman Pra-Hindu Budha, Hindu-Budha, dan Zaman Islam Masuk di Indonesia

Guru merupakan pekerjaan tertua. Lebih dulu dibandingkan arsitek yang baru ada setelah manusia tidak lagi tinggal di gua. Atau, lebih juga dari insiyur metalurgi yang baru muncul pada masa manusia mengenal logam dan pengolahannya. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan.

Pada awal kemunculan, seseorang membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapat dan dijadikan panutan. Orang-orang kebanyakan mendatangi pertapa. Pertapa adalah orang yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawinya dan berdiam di suatu tempat tertentu untuk merenung dengan harapan mendapatkan wahyu dari hal yang ia percayai.

Pada umumnya, pertapa mendiami gua-gua, di bawah pohon yang besar dan rindang. Di tempat tersebut, pertapa bersila sembari mendengarkan kesunyian. Di tempat itulah kebanyakan orang awam percaya bahwa orang yang mampu bertapa/hidup tanpa ada hasrat keduniawian, memiliki ilmu yang bermanfaat.



Gambar a.1 Pertapa yang dijadikan guru pada zaman dahulu

Kebanyakan pertapa adalah orang yang memang mampu secara ekonomi, atau memiliki kekuasaan. Namun ada juga, pertapa yang berasal dari kaum yang tidak berada. Orang-orang yang mendatangi pertapa dan dijadikan muridnya, biasanya mengolah tanah yang dimiliki pertapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam kesehariannya, setelah mengolah tanah di pagi sampai siang hari, para pencari ilmu mendatangi pertapa dan meminta nasihat. Nasihat-nasihat yang diberikan biasanya berupa nasihat tentang bagaimana menjalani hidup dengan tenang sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, nasihat tersebut kadang berupa tugas yang harus dilalui oleh pencari ilmu dan baru boleh kembali pada saat mereka sudah menyelesaikan tugasnya.

Selanjutnya, sistem pendidikan pada masa kerajaan hindu-budha, sudah mengenal adanya guru. Pada masa agama hindu, yang mengenal sistem kasta, guru berasal dari kasta Brahmana yang dikenal dengan nama begawan. Dalam hal ini, kasta guru setingkat lebih rendah dari raja. Oleh karena itu, Begawan memiliki hak-hak tertentu, dan cenderung dimuliakan oleh

masyarakat karena dianggap sebagai penjelmaan kehidupan spiritual kebenaran. Pada masa itu, di dalam menyampaikan pengetahuan dari buku suci (Weda), para siswa tinggal di rumah Begawan tersebut serta mengabdikan dengan penuh kesetiaan dan pengabdian. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada saat ajaran agama Budha mempengaruhi nusantara. Jejak pengajaran pada masa budha, dapat diketahui melalui pada zaman kerajaan Sriwijaya. Tujuan utama pendidikan berdasarkan ajaran Sidharta Gautamma, yakni setiap manusia penganut Budha dididik menjadi manusia sempurna agar dapat masuk nirwana/ surga. Salah seorang guru yang terkenal adalah Darmapala. Sistem pengajarannya menggunakan format asrama sebagai sekolah sekaligus tempat tinggal para siswa dan guru. "Belajar menjadi etos baru bagi kehidupan umat. Hal ini dibuktikan melalui bentuk dari salah satu arca di Candi Borobudur. Arca Dhyani Budha bersikap darma cakra mudra, kedua tangannya di dada menggambarkan, bahwa manusia hidup harus belajar (PGRI, 2008: 3)". Corak pendidikan masa hindu-budha, ternyata memberikan pengaruh pula pada sistem pendidikan islam.

Masuknya islam ke tanah air mempengaruhi sudut pandang masyarakat, yang memerlukan pendalaman ajaran agama islam. Oleh karena itu, dikenalah sistem pesantren. Dalam proses belajarnya, pesantren mengandung corak ajaran hindu-budha. Pesantren mempercayakan pendidikan pada seorang guru yang disebut kiyai. Pada mulanya pembelajaran dilaksanakan di langgar-langgar atau pelataran masjid. Namun, karena jumlah santri semakin banyak maka pembelajaran dilakukan di rumah kiyai. Kemudian untuk dapat memaksimalkan pemahaman akan ajaran agama islam, maka pesantren menjadi sistem asrama. Sehingga murid atau santri tinggal berdekatan dengan guru. Hal tersebut kemudian membawa pengaruh bagi perkembangan pesantren, sehingga pesantren menjadi lebih besar peranannya. Selain sebagai sarana belajar, pesantren telah dipercaya oleh masyarakat sebagai pewaris nilai-nilai guna melengkapi nilai-nilai yang

diajarkan dalam lingkungan keluarga. Berkembangnya peran pesantren tersebut, akhirnya memunculkan konsekuensi logis adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup bagi para santri dan guru yang tinggal di pesantren.

Akhirnya, pesantren mengajarkan untuk mengelola alam, sehingga pesantren berupaya mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila menilik kemampuan pesantren dalam pewarisan nilai-nilai, tidak lepas dari peran kiai sebagai pemimpin pesantren. Karena pada umumnya sebuah pesantren dapat berdiri karena gagasan seorang kiai yang telah mempunyai bidang keilmuannya, sehingga perlu meneruskan pengetahuannya pada generasi selanjutnya.

b. Guru di Zaman Pendudukan Belanda di Indonesia.

Selanjutnya pada masa kolonial Belanda pun memberikan warna tersendiri pada pembangunan pendidikan Indonesia. Masa kolonial Belanda memperkenalkan sekolah, yang pada dasarnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Sekolah pada awal kemunculannya berkembang di Yunani, yang berarti waktu luang. Hal ini dilakukan oleh para orang tua yang bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk memberikan pengajaran pada anak-anaknya. Sehingga anak-anak dipercayakan pada orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih di sekolah. Pada akhirnya sekolah menjadi tempat perkumpulan bagi anak-anak untuk mengkaji mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan (Topatimasang, 2013: 5-6)". Perkembangan sekolah muncul di berbagai Negara, termasuk Belanda yang pada akhirnya menerapkan sistem sekolah pula di Indonesia. Namun, sistem sekolah yang diperkenalkan oleh kaum kolonial terhadap rakyat Indonesia ini hanya diperuntukan bagi orang Belanda itu sendiri serta kaum ningrat.

Adanya sekolah pada masa kolonial, bukan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana hakikat pendidikan. Tetapi,

sekolah pada saat itu mulai memperkenalkan masyarakat pada orientasi bekerja dan upah. “Tahun 1617 pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah pertama di Batavia (Jakarta). Sekolah ini masa belajarnya selama lima tahun.

Tujuan utama sekolah ini, yakni menghasilkan tenaga administrasi yang cakap, yang nantinya bisa dipekerjakan pemerintah, administrasi dan gereja. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Tahun 1648, seiring dengan mulai kompleksnya mekanisme penyelenggaraan pendidikan, maka kali pertama pemerintah Belanda membuat undang-undang sekolah yang menjadi cikal bakal sistem sekolah yang dikenal saat ini. Isinya, antara lain: a.Sekolah yang akan didirikan harus dengan izin pemerintah Belanda b.Jam sekolah berlangsung mulai pukul 08.00-11.00 atau pukul 14.00-17.00 c.Pelajaran campuran murid laki-laki dan perempuan dilarang d.Hari libur dan uang sekolah diatur pemerintah e.Sekolah-sekolah harus dipantau 2 kali setahun (PGRI, 2008: 7)” Sedangkan, bagi rakyat pribumi biasa tidak disediakan sekolah oleh kolonial. Sehingga pendidikan rakyat berlangsung di daerah-daerah secara mandiri yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Melalui sistem sekolah yang dideklarasikan oleh kolonial, maka berimbas pula pada guru. Guru pada awalnya diangkat secara sembarang, karena kualifikasinya hanya mampu membaca, menulis dan berhitung saja, serta satu orang guru dapat mengajar puluhan bahkan ratusan murid. Akhirnya, pada April 1852 di Surakarta didirikan Kweekschool, yang merupakan sekolah guru pertama. Sejak inilah guru menjadi sebuah profesi baru di kalangan masyarakat. Guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah diikat oleh syarat-syarat tertentu, terutama haruslah tamatan dari sekolah guru buatan Belanda. Namun, dengan kebijakan tersebut tidak membuat para guru lupa kulitnya, karena guru justru berupaya mengambil peran dalam pencerdasan bangsa.

Munculnya sekolah yang didirikan Belanda pada kenyataannya mengilhami beberapa tokoh pejuang bangsa ini untuk turut serta mendirikan sekolah serupa. Karena dalam sumber lain menyatakan bahwa tujuan Belanda mendirikan sekolah di Nusantara bukan semata-mata untuk menjalankan politik yang menguntungkan Belanda. Melainkan terdapat maksud untuk memberikan satu jejak positif terhadap Negara jajahan agar mampu mengembangkan dirinya kelak melalui pendidikan. Karena bagaimanapun akan selalu diamini bahwa pengembangan SDM adalah melalui pendidikan. Pada akhirnya, perguliran sejarah pergerakan kebangsaan di tanah air telah mencatatkan figur guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pejuang di garda depan yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Tokoh-tokoh yang mengembangkan lembaga pendidikan diantaranya, Organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr.Wahidin Sudiro Husodo; Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Ahmad Dahlan; K.H Hasyim Ashari yang mendirikan organisasi Nahdatul Ulama (NU) yang bertujuan mengembangkan dan memajukan pendidikan anak bangsa; serta Ki Hajar Dewantara (Suryadi Suryaningrat) yang mendirikan Perguruan Taman Siswa dengan tiga semboyannya yang sebenarnya dicetuskan oleh kakak Kartini, Sasro Kartono, yang sengaja diucapkan berdasarkan hasil pikirannya bahwa sebagai seorang guru harus berada di depan, tengah dan belakang. Banyak tokoh pejuang lain seperti R.A Kartini, Dewi Sartika dan Rohana Kudus yang juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan cirri khasnya masing-masing.

Melalui organisasi yang berlatar belakang pendidikan tersebutlah nyata perjuangan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana dengan kondisi guru pada saat itu? Guru pada saat itu sudah berupaya dikelola dengan lebih baik. Karena telah tersedianya berbagai sekolah guru, namun tetap dalam pengawasan kolonial. Sehingga sekolah guru pun terkotak-kotakan, ada sekolah guru yang dikhususkan akan mengajar bangsa Belanda, sekolah guru

pengajar bangsawan serta sekolah guru pengajar rakyat biasa. Kondisi tersebut menjadikan tidak adanya penyetaraan pendidikan. Namun, hal yang menarik yang terjadi pada saat itu, guru tetap menjadi suri teladan bagi masyarakat. Guru pun memiliki idealisme dalam menjalani profesinya, yakni mencerdaskan bangsa.

B. Guru Sebagai Profesi Di Indonesia

Guru sebagai Profesi di Indonesia, ditandai dengan lahirnya UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," dan ayat (5) yang berbunyi: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.", UU Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, Sistem Pendidikan Nasional, Kualifikasi serta Kompetensi Guru dan Dosen, Standar Kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

Dalam kaitannya dengan Guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Selain mengatur hal-hal penting diatas, UUGD juga mengatur hal lain yang tak kalah pentingnya bagi kemajuan dan kesejahteraan para guru. UU Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari UU ini dapat dibagi dalam beberapa bagian.

Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari:

- (a) Ketentuan Umum,
- (b) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan, dan
- (c) Prinsip Profesionalitas.

Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari

- (a) Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi,
- (b) Hak dan Kewajiban,
- (c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas,
- (d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian,
- (e) Pembinaan dan Pengembangan,
- (f) Penghargaan,
- (g) Perlindungan,
- (h) Cuti, dan
- (h) Organisasi Profesi.

Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari

- (a) Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik,
- (b) Hak dan Kewajiban Dosen,
- (c) Wajib Kerja dan Ikatan Dinas,
- (d) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian,
- (e) Pembinaan dan Pengembangan,

- (f) Penghargaan,
- (g) Perlindungan, dan
- (h) Cuti.

Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal). Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal). Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya.

Setelah muncul kebijakan tentang UUGD di atas, pemerintah kemudian melahirkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang khusus tentang guru, mulai dari Permendiknas No. 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik, Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (diperbarui dengan Permendiknas No. 10 tahun 2009) hingga Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang semuanya telah mengatur segala hal tentang masa depan guru yang cukup menjanjikan.

Rangkuman

- a. Pada awal kemunculan, seseorang membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapat dan dijadikan panutan. Orang-orang kebanyakan mendatangi pertapa.
- b. Pada masa agama hindu, yang mengenal sistem kasta, guru berasal dari kasta Brahmana yang dikenal dengan nama Begawan.
- c. Masuknya islam ke tanah air mempengaruhi sudut pandang masyarakat, yang memerlukan pendalaman ajaran agama islam. Oleh karena itu, dikenalah sistem pesantren. Dalam proses belajarnya, pesantren mengandung corak ajaran hindu-budha
- d. Perkembangan sekolah muncul di berbagai Negara, termasuk Belanda yang pada akhirnya menerapkan sistem sekolah pula di Indonesia. Namun, sistem sekolah yang diperkenalkan oleh kaum kolonial terhadap rakyat

Indonesia ini hanya diperuntukan bagi orang Belanda itu sendiri serta kaum ningrat.

- e. Pada masa sekarang, guru menjadi profesi dengan lahirnya UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005

Latihan

1. Jelaskan bagaimana sejarah guru pada masa Hindu-Budha!
2. Pada awal pendudukan Belanda, apakah tujuan dari diadakannya sekolah?
3. UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah profesi guru di Indonesia, jelaskan mengapa demikian?

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah memahami sejarah profesi guru di Indonesia, buatlah rangkuman dengan bahasamu sendiri!